

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINALISASI

A.1 Pengertian Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.²¹

Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.²²

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini

²⁰ Tim Redaksi Kamus. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Cetakan Pertama. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal.1176.*

²¹ Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya. 2019. *Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia.* Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18 (1), June 2019 – 735. Hal. 4.

²² Rusli Effendi 1998. “Masalah Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” Dalam Bphn, *Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia.* Jakarta : Binacipta. Hal. 64-65

diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.²³

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kriminalisasi sangat erat kaitannya dengan *Asas Legalitas*, Pasal 1 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa :

*“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*²⁴

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana sebelum adanya ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur hal tersebut. Sama halnya dengan Kriminalisasi, yaitu penetapan dari penguasa terhadap perbuatan tercela atau perbuatan dilarang, yang sebelumnya tidak dituntut pidana, menjadi perbuatan yang dapat dituntut pidana dan ada ancaman sanksi pidananya.

Pemaparan mengenai pengertian Kriminalisasi yang merupakan subbab dari Kriminalisasi adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait pengertian Kriminalisasi yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai pemahaman dalam pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam Kriminalisasi.

A.2 Kriteria atau Ukuran Kriminalisasi

Kriteria atau Ukuran sangat penting dalam penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang berarti perbuatan tersebut dilarang dan diberi

²³ Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. Hal. 31

²⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

sanksi pidana. Herbert L Packer memberikan penjelasan terkait Kriteria immoral yaitu sebagai berikut :

“Only conduct generally considered immoral should be treated as criminal, beside, harm to others to include risk of damage to interest of others, and it is usually possible to make a more or less plausible argument that any given form conduct involves that risk in some way”.

(“Satu-satunya tingkah laku yang biasanya dipertimbangkan tidak bermoral harus diperlakukan sebagai kriminal, di samping, merugikan orang lain untuk memasukkan risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya dimungkinkan untuk membuat argumen yang lebih atau kurang masuk akal bahwa setiap bentuk perilaku yang diberikan melibatkan risiko dalam cara tertentu”).²⁵

Perbuatan *immoral* bukan dalam arti daya pembeda benar atau salah, adil atau tidak adil dalam diri seseorang, melainkan keseluruhan orang-orang dalam masyarakat yang selalu berkembang dan berubah. Sehingga bersifat melukai masyarakat, merugikan, atau mencelakakan orang lain.²⁶ Jadi perbuatan immoral yang dimaksud disini berarti perbuatan yang mengakibatkan kerugian, kecelakaan, kerusakan atau dampak tidak baik atau buruk bagi orang lain. Karena hal tersebut, perbuatan immoral sering dikatakan sebagai perbuatan Kriminal.

²⁵ Johan Pramudya Utama. *Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*. Jurnal Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hal. 203.

²⁶ *Ibid.* Hal. 204.

Melalui Simposium Pembaharuan Hukum Pidana, telah disimpulkan beberapa kriteria umum dalam melakukan kriminalisasi, antara lain:

- a. Mempertimbangkan suatu perbuatan dibenci atau tidak disukai oleh masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Mempertimbangkan biaya kriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, mulai dari proses pembuatan undang-undang, pengawasan hukum, dan pengakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban maupun pelaku kejahatan yang harus seimbang dengan kondisi tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Mempertimbangkan keseimbangan sesuai kemampuan aparat penegak hukum sehingga tidak membebani tugasnya;
- d. Mempertimbangkan perbuatan-perbuatan yang dapat berpotensi bahaya bagi seluruh masyarakat sehingga dapat menghambat atau menghalangi cita-cita Bangsa Indonesia.²⁷

Dari seluruh pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria atau ukuran kriminalisasi yaitu Perbuatan tersebut apakah perbuatan yang tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat, Perbuatan tersebut menyebabkan korban, Perbuatan tersebut berbahaya bagi masyarakat, Perbuatan tersebut menghambat cita-cita bangsa, juga mencakup pertimbangan-pertimbangan lain mengenai pembuatan undang-undangnya, meliputi biaya, sanksi Pidana, Pengawasan, dan Penegakan Hukumnya.

Dikutipnya dan dicantumkannya subbab tentang Kriteria dan Ukuran Kriminalisasi dalam Penelitian hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman terkait ukuran, batasan maupun

²⁷ Basit Barry. 2018. *Skripsi : Urgensi Kriminalisasi Perbuatan Homoseks Di Indonesia*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hal. 18.

kriteria terhadap suatu perbuatan yang bisa dikriminalisasikan menjadi suatu perbuatan Tindak Pidana. Hal ini bisa digunakan dalam pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang dikriminalisasikan menjadi perbuatan Tindak Pidana. Penulis menggunakan Kriteria Umum Simposium Pembaharuan Hukum Pidana dalam melakukan kriminalisasi sebagai Landasan Kriteria *CyberSex* Sebagai Tindak Pidana dalam BAB penelitian dan pembahasan.

A.3 Asas-Asas Kriminalisasi

Asas-Asas Kriminalisasi dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana yaitu sebagai berikut :

a. Asas Legalitas

Menurut Moeljatno, asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Istilah tersebut sering dikenal dalam bahasa Latin sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang dikemukakan oleh von Feuerbach. Asas *Legalitas* merupakan asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalisasi.²⁸

b. Asas Subsidiaritas

Dalam asas ini, hukum pidana bukan ditempatkan sebagai *primum remedium* (senjata utama), namun harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal.²⁹

²⁸ *Ibid.* Hal. 27-28.

²⁹ *Ibid.* Hal. 30.

Terdapat 2 faktor, asas subsidiaritas perlu menjadi dasar dalam melakukan upaya kriminalisasi, yaitu :³⁰

- 1) Penggunaan asas subsidiaritas akan mendorong lahirnya hukum pidana yang adil;
- 2) Praktik perundang-undangan menimbulkan dampak negatif terhadap sistem hukum pidana akibat adanya overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga hukum pidana menjadi kehilangan pengaruhnya dalam masyarakat.

c. Asas Persamaan

Asas persamaan atau kesamaan mempunyai kedudukan penting dalam melakukan upaya kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Menurut Servan dan Letrossne, asas persamaan atau kesamaan bukanlah pernyataan dari aspirasi tentang hukum pidana yang lebih adil, melainkan merupakan suatu keinginan diadakannya sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana. Lacretelle berpendapat, bahwa asas persamaan atau kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.³¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya Kriminalisasi diperlukanlah 3 Asas Penting yaitu Asas Legalitas, Asas Subsidiaritas dan Asas Kesamaan. Asas Legalitas berfungsi dalam Penetapan suatu Perbuatan Pidana, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana sebelum adanya ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur hal tersebut. Asas Subsidiaritas berfungsi dalam Penetapan Hukum Pidana sebagai langkah akhir dan Asas Persamaan atau

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* Hal. 31.

Kesamaan berfungsi dalam Penetapan Hukum Pidana yang Adil dan Tepat.

Dikutipnya dan dicantumkan subbab tentang Asas-Asas Kriminalisasi dalam Penelitian hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman Asas apa aja yang diperlukan dalam Upaya Kriminalisasi.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG CYBERSEX

B.1 Pengertian Sex

Seks (*sex*) adalah suatu konsep tentang perbedaan jenis kelamin manusia berdasarkan faktor-faktor biologis, hormonal, dan patologis. Karena dominannya pengaruh paradigma patriarkhis dan heteronormativitas dalam masyarakat, secara biologis manusia hanya dibedakan secara kaku ke dalam dua jenis kelamin (seks), yaitu laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*).³²

Kata seks berasal dari bahasa Inggris *sex*, berarti jenis kelamin. Pemahaman ini diperjelas dalam kamus lainnya bahwa “*sex is the characteristics which distinguish the male from the female*”, yakni ciri-ciri yang membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Seks disebut juga jenis kelamin, merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.³³

Alat-alat secara biologis tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Jika didefinisikan secara seks laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun (kala

³² Achmad Walidun Ni'am. 2016. *Skripsi : Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Tulungagung : Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung. Hal. 19.

³³ Yassirli Amri Wilda. 2018. *Skripsi : Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Hal. 22.

manjing), dan memproduksi sperma. Sedangkan secara Seks perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Hal tersebut adalah ketentuan biologis yang secara permanen tidak berubah dan atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan (kodrat).³⁴

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Seks merupakan suatu Pembeda jenis antara laki-laki dan perempuan yang bisa dilihat dari faktor biologisnya. Misalnya laki-laki yang memiliki dada bidang, jakun, penis yang dapat mengeluarkan sperma, tubuhnya yang lebih besar dan sebagainya. Sedangkan perempuan memiliki tubuh yang lebih kecil, memiliki payudara, Rahim yang menghasilkan sel telur dan sebagainya.

Dikutipnya dan dicantumkan subbab tentang Pengertian Seks dalam Penelitian hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman mengenai seks serta sebagai bahan untuk Analisa dalam pembahasan perkembangan seks menjadi suatu perbuatan tindak pidana.

B.2 Pengertian Seksualitas

Seksualitas adalah sebuah proses sosial budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia. Seksualitas dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritual. Seksualitas merupakan hal positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan juga kejujuran seseorang terhadap dirinya.³⁵

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Achmad Walidun Ni'am. *Op.Cit.*, Hal. 21.

Abraham menjelaskan bahwa konsep seksualitas mencakup tidak hanya identitas seksual, orientasi seksual, norma seksual, praktik seksual, dan kebiasaan seksual, namun juga perasaan, hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual termasuk di dalamnya hubungan heteroseksual serta hubungan homoseksual. Hal ini mencakup pengalaman subjektif serta pemaknaan yang melekat di dalamnya. Konsep seksualitas mencakup tidak hanya secara biologis dan psikologis, namun juga dimensi sosial dan budaya dari identitas dan kebiasaan seksual.³⁶

Dengan demikian, seksualitas bukanlah bawaan atau kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pergumulan, dan perjuangan manusia. Seksualitas merupakan ruang kebudayaan manusia untuk mengekspresikan dirinya terhadap orang lain dalam arti yang sangat kompleks, menyangkut identitas diri (*self identity*), tindakan seks (*sex action*), perilaku seksual (*sexual behavior*), dan orientasi seksual (*sexual orientation*). Perlu diketahui bahwa seksualitas, baik laki-laki maupun perempuan, adalah segala sesuatu yang instrinsik tentang tubuh dan kenikmatan seksual keduanya. Karena itu, seksualitas perempuan misalnya tidak melulu soal vagina dan payudara, melainkan mencakup seluruh tubuhnya, termasuk pikiran dan perasaannya. Demikian pula seksualitas pada laki-laki, tidak hanya terkait dengan penis dan organ seksual lainnya, melainkan juga berkaitan dengan pikiran dan perasaannya.³⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa Seksualitas sangat berbeda dengan seks. Seks lebih mengarah kepada faktor biologis yang ada di dalam tubuh manusia yang mencakup perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Seksualitas lebih abstrak yang mencakup

³⁶ *Ibid.* Hal. 23.

³⁷ *Ibid.* Hal. 23-24.

seluruhnya yaitu yang lebih mengarah kepada Hasrat dan birahi yang ada dalam manusia.

Dikutipnya dan dicantumkan subbab tentang Pengertian Seksualitas dalam Penelitian hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman mengenai seksualitas dan perbedaan antara seks dan seksualitas serta sebagai bahan untuk Analisa dalam pembahasan perkembangan seks menjadi suatu perbuatan tindak pidana.

B.3 Pengertian Perilaku Seksual

Perilaku seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Perilaku seksual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, interpretasi agama, adat tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Karena itu, perilaku seksual merupakan konstruksi seksual, tidak bersifat kodrati, dan tentu saja dapat dipelajari. Ada banyak cara disamping cara yang konvensional memasukkan penis ke dalam vagina juga dikenal cara lainnya dalam bentuk *oral seks* dan *anal seks* (disebut juga *sodomi* atau *liwath* dalam bahasa arab). Sodomi atau liwath adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam dubur (anus), baik dubur lelaki maupun dubur perempuan.³⁸

Sebagai manusia yang beragama, kita perlu mengkampanyekan agar perilaku seksual dilakukan tanpa kekerasan, pemaksaan, dan dalam lembaga perkawinan, bukan di luar perkawinan. Meskipun dilakukan dalam perkawinan, perilaku seksual harus memperhatikan prinsip-prinsip non-diskriminasi, tanpa kekerasan, dan hak kesehatan reproduksi perempuan tetap harus dilindungi. Perilaku seksual yang disarankan adalah perilaku seksual yang didalamnya ada unsur aman, nyaman, halal,

³⁸ *Ibid.* Hal. 30.

dan bertanggung jawab. Bukan perilaku seksual yang mengandung unsur dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Bukan juga perilaku seksual yang tidak aman karena dapat menularkan virus penyakit kelamin dan HIV/AIDS.³⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perilaku Seksual sangat berbeda dengan Seks dan Seksualitas. Perilaku Seksual adalah cara seseorang mengekspresikan hubungan seksualnya. Dan hal tersebut tidak bersifat kodrat melainkan dapat dipelajari oleh manusia. Seiring berkembangnya zaman, tentu hal tersebut juga semakin berkembang. Seperti yang kita ketahui perilaku seksual lainnya yaitu sodomi, masturbasi, *incest*, *fedofili*. Hal ini juga tidak jauh pembahasannya dengan *CyberSex*. *CyberSex* juga salah satu Perilaku Seksual yang berkembang karena perkembangan teknologi yang pesat. Mudah-mudahan dalam berkomunikasi membuat manusia menyalahgunakan komunikasi tersebut untuk hal yang negatif. Contohnya adalah melakukan pertemuan dalam dunia maya untuk saling berinteraksi meraih tujuan seksualnya, yaitu dengan cara berfantasi seksual dengan membagikan pengalaman seksualnya.

Dikutipnya dan dicantumkan subbab tentang Pengertian Perilaku Seksual dalam Penelitian hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran serta pemahaman mengenai Perilaku Seksual dan perbedaannya antara seks dan seksualitas serta sebagai bahan untuk Analisa dalam pembahasan perkembangan seks menjadi suatu perbuatan tindak pidana.

³⁹ *Ibid.* Hal. 31-32.

B.4 Pengertian *CyberSex*

Fauzan dan Baharuddin Siagian dalam Bukunya yang berjudul Kamus Hukum dan Yurisprudensi mengatakan bahwa Pengertian *CyberSex* adalah Komunikasi melalui alat elektronik, seperti email (surat-surat elektronik), percakapan atau *newsgroup* dengan tujuan rangsangan atau kepuasan seksual.⁴⁰

Peter David Goldberg mendefinisikan *CyberSex* sebagai pemanfaatan/penggunaan internet untuk tujuan seksual (*the use of the internet for sexual purpose*). Senada dengan Peter David Goldberg, David Greenfield mengatakan bahwa cyber sex adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*using the computer for any form of sexual expression or gratification*). Selanjutnya David Greenfield menambahkan bahwa *CyberSex* dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya (*virtual gratification*), dan suatu bentuk baru dari keintiman (*a new type of intimacy*). Hubungan intim atau keintiman ini dapat bermakna hubungan seksual atau perbuatan zina.⁴¹

Dalam ensiklopedia bebas Wikipedia dinyatakan bahwa “*CyberSex*” atau “*ComputerSex*” Adalah “pertemuan *Sex* secara *virtual*/maya antara dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual. *CyberSex/ ComputerSex* merupakan bentuk permainan-peran (*Role-playing*) antara para partisipan yang berpura-pura atau menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka. *Cybersex* ini terkadang disebut juga dengan istilah “*Cybering*”. Menurut Greenfield dan Orzack, *cybering* ini dimasukkan

⁴⁰ Fauzan Dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Jakarta : Kencana. Hal. 183.

⁴¹ Barda Nawawi Arief. 2005. *Tindak Pidana Mayantara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal. 177.

dalam penggolongan *cybersex* yang berupa *Online Sexual Activity* (OSA) karena dengan *cybering* itu, salah seorang atau kedua orang yang saling berfantasi itu dapat melakukan masturbasi (onani). Bahkan menurut Kenneth Allen, “*An important and major element of cybersexual activity is masturbation*”.⁴²

Hubungan intim atau keintiman ini dapat bermakna hubungan seksual atau perbuatan zina. Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa *CyberSex*, kepuasan seksual bersarankan internet adalah zina bentuk baru dengan dasar pemikiran bahwa paradigma perilaku telah banyak bergeser dan berubah yaitu aktifitas-aktifitas fisik, riil ke aktifitas-aktifitas non fisik, dan virtual.⁴³

Cybersex/ComputerSex adalah :

- a. Adalah “penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual”;
- b. Adalah “penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual”;
- c. merupakan “bentuk baru dari keintiman” (*a new type of intimacy*), yang dapat juga diartikan sebagai bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*);
- d. dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya (*virtual sex expression/gratification*);
- e. merupakan bentuk pertemuan *sex* secara virtual/maya (*virtual sex en-counter*) atau *sex online*;
- f. pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk membangkitkan

⁴² Barda Nawari Arief. 2005. *Kebijakan Penanggulangan Cyber Crime Dan Cyber Sex*. Jurnal Law Reform. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2005. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hal. 16-17.

⁴³ Suroso. 2007. Thesis : *Kebijakan Kriminal Cyber Crime Terhadap Anak (Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Dan Pendidikan Moral)*. Semarang : Program Magister Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Hal. 120.

- rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani);
- g. dilihat dari sudut akibat, banyak dampak negatif bagi sipelaku sendiri, merusak harmonisasi hubungan perkawinan, merusak sistem kekeluargaan, dan merusak atau membahayakan anak-anak.⁴⁴

CyberSex adalah seni bagaimana membuat penggunaan internet bisa memanjakan khayalan seksual dan untuk bermain peran seksual, saling berinteraksi dengan orang lain di internet. Mereka saling menukar teks, gambaran dan bunyi/suara dalam rangka membangunkan atau membangkitkan satu sama lain secara emosional dan secara seksual. Selama berinteraksi, mereka menunjukkan khayalan-khayalan akan kasih dan seksual mereka.⁴⁵

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *CyberSex* adalah penggunaan internet yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan seksual, berupa pertemuan *Sex* atau keintiman guna meningkatkan fantasi seksualnya dengan cara saling mengirimkan pesan-pesan seksual atau menggambarkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani).

Pemaparan mengenai pengertian *CyberSex* yang merupakan subbab dari *CyberSex* adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait pengertian *CyberSex* yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai pemahaman dalam pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam *CyberSex* dan dalam Penelitian ini.

⁴⁴ Reimon Supusepa. *Op.Cit.* Hal. 69.

⁴⁵ Novita Eka Sari. 2011. Thesis : *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Cyber Sex*. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Hal. 86

B.5 Perkembangan dan Ruang Lingkup *CyberSex*

Teknologi komunikasi memberi kesempatan bagi orang untuk berhubungan dengan cara yang baru. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang mengglobal dengan adanya internet, memungkinkan orang dapat menikmati seks secara virtual tanpa melalui kontak secara jasmani. Sehingga memunculkan fenomena format bercinta tanpa kontak jasmani yang disebut sebagai *netlove* atau lazim disebut *CyberSex*.⁴⁶

Benar atau salah, tetapi kenyataannya hubungan tersebut memiliki komponen kehidupan yang nyata walaupun berada di dunia maya. Teknologi telah meningkatkan hubungan emosional dan seksual mereka dengan bentuk-bentuk yang baru dan khusus. Perasaan seksual yang diperlihatkan oleh pelaku di dalam hubungan sebetulnya adalah sesuatu yang sangat riil dan secara emosional sama seperti perasaan yang terjadi dalam hubungan seksual.⁴⁷

Hal yang menarik dari sini adalah bahwa Kejahatan asusila ini terus berkembang sejalan dengan berkembangnya Teknologi. Dahulu, kegiatannya hanya sebatas menonton, mengupload dan mendownload konten-konten Pornografi di situs atau web Porno yang beredar. Kegiatan tersebut semakin luas semenjak munculnya aplikasi Chating maupun *Skype*, yang digunakan oleh Pelaku untuk meningkatkan gairah seksnya dengan mengobrol berbaur porno bahkan melakukan kegiatan intim tanpa harus berhubungan langsung seperti Masturbasi/Onani dengan hanya saling menatap kegiatan lawannya. Dengan berkembangnya teknologi tersebut, dimanfaatkan untuk melakukan seks secara virtual tanpa adanya kontak jasmani satu sama lain. Berbeda dengan bentuk zina yang

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 86

⁴⁷ *Ibid.*

dilakukan dalam Dunia Nyata atau secara fisik dapat dirasakan, *CyberSex* justru dilakukan dalam Dunia Maya dengan perasaan emosional dan seksual dari masing-masing pihak dengan cara berkhayal.

CyberSex ditawarkan secara bebas dan luas di Salah satu Media Sosial yakni Instagram.⁴⁸ Pelaku *CyberSex* menawarkan kepada Pengikutnya bahwa ia membuka sesi *ChatSex*, *Video Call Sex* dan *Phone Sex* secara Berbayar. Tarif yang ditawarkan sekitar Rp. 50.000 – Rp. 300.000 lebih selama 1 (satu) Jam. Tidak sedikit dari Pelaku *CyberSex* memberikan bonus foto maupun video dirinya kepada orang yang mau membayar “*Jasanya*” tersebut. Tanpa rasa bersalah, Pelaku menyebarkan beberapa “*Testimoni*” *ChatSex*, *VideoCall Sex* dirinya dengan Pelanggan yang sudah membayar “*Jasanya*” dalam Akun Instagram miliknya guna menarik perhatian orang yang melihat tawarannya tersebut.⁴⁹ *CyberSex* juga mudah didapatkan dengan masuk ke aplikasi Twitter dengan mencari *Hastag* #*Videocallsex* #*ChatSex* dan #*PhoneSex* maka sudah muncul ribuan akun yang menawarkan jasa *CyberSex* tersebut.

Selain Media Sosial Instagram dan Twitter, Pelaku *CyberSex* ini juga memanfaatkan Media Sosial lainnya seperti Whisper. Harga yang ditawarkan untuk berbagai layanan seks tersebut juga berbeda-beda mulai dari harga yang murah hingga harga yang cukup mahal. Misalnya layanan *VideoCall Sex* (VCS) dan *ChatSex* (CS) ditawarkan dengan harga Rp.

⁴⁸ Akun Instagram @Rioprataxxxxx, @Aprilxxxxx, @Lia.xxxxx. Tanggal Akses 30 April 2019.

⁴⁹ Akun Instagram @Natassya_Anxxxxxx. Tanggal Akses 20 Maret 2019.

50.000 hingga Rp. 100.000. Sedangkan untuk berhubungan seksual harganya lebih mahal mulai dari Rp. 400.000 hingga Rp 1.300.000.⁵⁰

CyberSex dilihat secara positif oleh pendukungnya sebagai terpenuhinya keinginan seksual tanpa resiko terkena penyakit seksual, dan merupakan suatu cara aman bagi anak-anak muda yang belum siap terlibat dalam aktivitas seksual untuk mengadakan percobaan, yang membiarkan pelakunya untuk menyelesaikan khayalan seksualnya yang rumit dan mengizinkan "hidup nyata" dengan partnernya yang secara fisik terpisahkan namun dapat melanjutkan hubungan seksual. Apalagi, sebagian orang terlibat dalam *CyberSex* khawatir dengan penyakit HIV sehingga akan memilihnya sebagai jalan untuk mencapai pelepasan dan kepuasan seksual secara aman tanpa menempatkan partnernya berhadapan dengan resiko.⁵¹

Dapat kita simpulkan bahwa ruang lingkup *CyberSex* sangat luas dan meliputi seluruh lapisan masyarakat karena berada di wilayah *CyberCrime* yaitu Kejahatan Dunia Maya. Sehingga Ruang Lingkup *CyberSex* dapat dilihat dari beberapa cara yang dapat dilakukan dalam *CyberSex* yaitu sebagai berikut :

1. *ChatSex* adalah Chat yang berisi obrolan seksual guna mencapai gairah Seksnya. Fantasi Seks Pelaku meningkat jika obrolan seksual tersebut ditunjang oleh beberapa video, foto maupun audio seksual lainnya dalam chat tersebut;
2. *VideoCall Sex* adalah kegiatan dimana Pelaku melakukan hubungan intim tanpa harus berhubungan langsung seperti Masturbasi/Onani

⁵⁰ Corong.Id. *Op.Cit.*

⁵¹ Novita Eka Sari, *Op.Cit.* Hal. 88

dengan hanya saling menatap satu sama lain. Pelaku berinteraksi satu sama lain dan berfantasi serta menggambarkan pengalaman seksual mereka secara nyata;

3. *Phone Sex* adalah kegiatan dimana Pelaku berbicara maupun mengobrol secara seksual dengan lawanya guna mencapai gairah Seks masing-masing. Sama halnya dengan *VideoCall Sex*, Pelaku berinteraksi satu sama lain dan berfantasi serta menggambarkan pengalaman seksual mereka secara nyata, namun hanya lewat suara.

Hal-hal yang terdapat dalam *CyberSex* yaitu merupakan Perbuatan Asusila, perzinahan, pornografi, tidak menutup kemungkinan juga terdapat prostitusi didalamnya maupun perdagangan orang. Sehingga *CyberSex* dalam lingkup *CyberCrime* ini merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena terus meningkat mengikuti perkembangan teknologi serta mempunyai dampak negatif yang cukup luas. Sehingga Kriminalisasi *CyberSex* sangatlah dibutuhkan bagi penegakan Hukum di Indonesia, mengingat dampaknya yang sangat luas mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Penjelasan mengenai perkembangan Jenis-Jenis *CyberSex* yang merupakan subbab dari *CyberSex* ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait perkembangan *CyberSex* yang terjadi di Indonesia yang kini semakin luas serta beraneka ragam jenis-jenis perbuatannya. Penjelasan jenis-jenis *CyberSex* ini sebagai pemahaman lebih lanjut untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan *CyberSex* tersebut.

B.6 Dampak/Akibat dari *CyberSex*

Meningkatnya *CyberSex* mengundang minat orang untuk melakukan berbagai penelitian. Penelitian yang telah dilakukan di Amerika, antara lain :

1. Cooper dkk, 2000, Meneliti tentang ciri-ciri dan pola kebiasaan para pecandu *CyberSex* (*CyberSex Addicts*)”;
2. Schneider, 2000, Meneliti tentang “Pengaruh/akibat penggunaan *CyberSex* terhadap pasangan mereka sendiri (suami/istri)”;
3. Peter David Goldberg, 2004, Meneliti tentang “Pengalaman para terapis keluarga dan perkawinan terhadap klien yang mengalami konflik akibat penggunaan *CyberSex*”.⁵²

Berdasarkan penelitian tersebut, banyak dijumpai akibat-akibat negatif dari penggunaan *CyberSex* terhadap diri sipelaku maupun terhadap hubungan perkawinan, terhadap keseluruhan hubungan/system kekeluargaan, dan terhadap anak-anak mereka. Akibat terhadap diri pelaku, antara lain, merubah pola tidur, mengisolasi diri dari keluarga, mengabaikan tanggung jawab, berdusta, berubahnya kepribadian, kehilangan daya Tarik terhadap partnernya (istri/suaminya), bersifat ambigius/mendusta, timbul perasaan malu dan bersalah, hilangnya rangsangan nafsu dan adanya gangguan ereksi (*erectile dysfunction*). Akibat terhadap partnernya (istri/suami) dan anak-anak, antara lain : timbul perasaan dikhianati, dilukai, dikesampingkan, dihancurkan, ditelantarkan, kesepian, malu, cemburu, kehilangan harga diri, perasaan dihina, anak-anak merasa kehilangan perhatian orang tua, depresi (karena pertengkaran orangtua).⁵³

Pat Gaudette dalam tulisannya “*Are They 'Having Sex'?*” mengatakan bahwa kerugian datang tidak hanya dalam bentuk apa yang dilakukan, tetapi lebih dalam wujud apa yang belum dilakukan. Sebagai seorang

⁵² Barda Nawari Arief. *Op.,Cit.* Hal. 17.

⁵³ *Ibid.* Hal. 17-18.

pencandu, orang akan lebih banyak menghabiskan waktu yang lebih banyak, mengasingkan diri dari pasangannya, dan menjauh dari keluarga. Ketika seseorang masuk ke dunia khayalan ini untuk membuat hubungan intim, ia akan kehilangan kemampuan untuk berhubungan intim dengan pasangannya baik secara emosional maupun seksual. Ketika ia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dirinya di dalam dunia khayalan ini, maka sesungguhnya ia mencoba meninggalkan pasangannya secara total. akan berantakan, keluarga hancur dan ia akan menjadi sangat kecanduan, kita melalaikan berbagai hal dalam hidup sekalipun itu hal yang paling utama dari semuanya. Pengabaian ini sangat menyakiti pasangannya, menyakiti anak-anak kita dan semua anak akan menderita.⁵⁴

Adanya akibat-akibat demikian, maka sering timbul pertengkarannya keluarga yang berakibat pada perceraian. Menurut Carl Salisbury (Pengacara di Hanover, New York), gugatan perkara yang berkaitan dengan *CyberSex* menunjukkan peningkatan di Pengadilan-Pengadilan Amerika. Dikatakan pula olehnya: “Tidak dapat dihindari bahwa kita sedang menyaksikan semakin banyaknya kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh *CyberSex*”.⁵⁵

Nanang Sari Atmanta mengatakan bahwa pengaksesan *CyberSex* oleh anak minimal menimbulkan dua akibat yang sangat menyolok dalam aktifitas kesehariannya, yaitu terjadinya gejala patologis sosial dan merangsang melakukan ekspresi seksual secara salah. Gejala patologis mengandung arti bahwa pengaksesan *CyberSex* telah banyak mendorong anak untuk melakukan tindak kriminal dan perilaku seks menyimpang.⁵⁶

Nanang Sari Atmanta menuturkan bahwa ekspresi seksual yang salah, bagi anak memiliki dampak langsung bagi aktifitas disekolahnya diantaranya adalah anak didik menjadi boros, karena uang saku lebih banyak dihabiskan di bilik-bilik warnet dari pada di tabung dan

⁵⁴ Novita Eka Sari, *Op.Cit.*, Hal 89-90.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hal. 18.

⁵⁶ Suroso. *Op.Cit.* Hal. 94.

dibelanjakan dikantin sekolah, menyebabkan daya konsentrasi saat menerima pelajaran menurun, untuk perkembangan pribadi anak pornografi adalah sarana paling mujarab menjadikan anak sebagai budak nafsu, malas belajar apalagi bekerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, bahkan menyebabkan kehilangan orientasi masa depan.⁵⁷ Hal tersebut akan mengakibatkan gagalnya tujuan Pendidikan nasional serta terhambatnya tujuan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan oleh *CyberSex* ini, mulai dari Dampak Negatif yang berakibat kepada diri sendiri, Keluarga, Istri, maupun Anak. Pelaku menjadi lepas tanggung jawab, selingkuh, mengabaikan istri dan kewajiban terhadap Anak. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang disebabkan oleh *CyberSex*. Diluar hal tersebut, tidak menutup kemungkinan kalangan anak-anak maupun remaja mendapatkan akses *CyberSex* yang begitu luas. Sangat disayangkan jika anak-anak maupun remaja yang menjadi generasi penerus bangsa justru mendapatkan akibat buruk dari *CyberSex* tersebut.

Dikutipnya atau dicantumkan mengenai Dampak-Dampak atau Akibat dari *CyberSex* dalam Penelitian Hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa *CyberSex* merupakan Kejahatan Asusila dalam Dunia Maya yang berdampak luas di masyarakat. Bahwa *CyberSex* merupakan perbuatan yang merugikan Masyarakat dan mengganggu keseimbangan yang ada di Masyarakat.

⁵⁷ *Ibid.* Hal. 96.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

C.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Kamus Hukum, Tindak Pidana adalah Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁸

Menurut Simons, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan Batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan *negative* (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁹

Menurut J. Bauman, perbuatan/ tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁰ Menurut Wiryono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.⁶¹

⁵⁸ Kamus Hukum. *Cetakan V (2010)*. Bandung : Citra Umbara.

⁵⁹ Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang : Umm Press. Hal. 95.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

Jika ditinjau dari Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa :

*“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*⁶²

Pasal 1 Ayat (1) KUHP menegaskan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipidana sebelum adanya ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur hal tersebut. Yang berarti bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar ketentuan atau aturan hukum yang berlaku dan bersifat melawan hukum sehingga mendapatkan ancaman pidana sesuai yang ada dalam ketentuan tersebut. Pemaparan mengenai pengertian Tindak Pidana yang merupakan subbab dari Tindak Pidana adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait pengertian Tindak Pidana yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai pemahaman dalam pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam Tindak Pidana.

C.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum Unsur-Unsur Tindak Pidana dapat dibedakan kedalam dua macam, yaitu⁶³ :

- a. Unsur Obyektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur Obyektif yang berupa “Perbuatan” yaitu Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

⁶² Lihat Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶³ Tongat, 2015. *Hukum Pidana Materiil (Cetakan Ketiga)*. Malang : Umm Press. Hal. 3-5.

- 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam Tindak Pidana materiil. Contoh unsur obyektif yang berupa suatu “Akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam Tindak Pidana.
 - 3) Keadaan atau Masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.
- b. Unsur Subyektif yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa :
- 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan bertanggung jawab).
 - 2) Kesalahan atau *schuld*.
Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :⁶⁴
 - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibatr perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Sedangkan unsur subyektif kedua yaitu unsur kesalahan atau *schuld*. Kesalahan atau *Schuld* dalam Hukum Pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu : *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan dan *Culpa* atau ketidaksengajaan.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

Penjabaran singkat mengenai unsur-unsur Tindak Pidana yang merupakan subbab dari Tindak Pidana dalam Penelitian Hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait Unsur Tindak Pidana dan sebagai pemahaman dalam pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam Tindak Pidana, serta sebagai Tolak ukur Penulis dalam Bab Pembahasan saat mengkualifikasi Perbuatan yang termasuk sebagai Tindak Pidana.

C.3 Kesalahan

Menurut Simons, kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin (dari si pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga si pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶⁶

Kesalahan normatif menentukan, bahwa kesalahan seseorang itu tidak hanya ditentukan berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi harus ada penilaian dari luar diri pembuat yaitu penilaian dari masyarakat dengan menggunakan ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, yaitu “apa yang seharusnya diperbuat oleh di pembuat”. Hanya orang-orang yang karena “kesengajaan/ dengan sengaja” atau karena “kelalaiannya” melakukan perbuatan pidana itulah yang patut “dicela”, sehingga oleh karenanya patut dianggap mempunyai kesalahan. Sebaliknya apabila seseorang melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak ada unsur “kesengajaan” maupun “kelalaian”, maka orang itu juga tidak patut dicela, sehingga karenanya juga tidak patut dianggap mempunyai “kesalahan”.⁶⁷ Jadi dapat diambil

⁶⁶ Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Op.Cit., Hal 200.

⁶⁷ *Ibid.* Hal. 201-202.

kesimpulan bahwa Kesalahan bisa saja ditentukan oleh orang yang melakukan perbuatan, yaitu pelaku atau orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui bahwa perbuatannya salah dan menghendaki terjadinya perbuatan tersebut meski ia tahu akibat dari perbuatan tersebut. Tetapi penentuan unsur kesalahan tersebut tidak hanya ditentukan oleh orang yang melakukan perbuatan, melainkan juga ditentukan oleh penilaian masyarakat luar pada umumnya.

1. *Dolus* atau *Opzet* atau Kesengajaan

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “Batasan/ Pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memory van Toelichting*). Di dalam penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau *Opzet* diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*). Dengan Batasan yang diberikan oleh *Memory van Toelichting* diatas secara umum dapatlah dikatakan, bahwa “kesengajaan” mengandung pengertian adanya “kehendak” dan adanya “kesadaran/pengetahuan” dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Dengan konstruksi demikian, maka seseorang dikatakan dengan “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu “menghendaki” terhadap dilakukannya perbuatan itu dan “menyadari/mengetahui” terhadap apa yang dilakukannya itu.⁶⁸

a. Teori-Teori Kesengajaan

1) Teori “Kehendak”

Menurut teori ini, seseorang dianggap “sengaja” melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki” dilakukannya perbuatan itu..⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.* Hal 213-214

⁶⁹ *Ibid.* Hal. 214.

2) Teori “Pengetahuan/Membayangkan”

Menurut teori ini, “sengaja” berarti “membayangkan” akan timbulnya akibat perbuatannya. Dalam pandangan teori ini orang tidak bisa “menghendaki” akibat (suatu perbuatan), tetapi hanya bisa “membayangkan” (akibat yang akan terjadi).⁷⁰

Jadi dapat diambil kesimpulan dari kedua teori tersebut, bahwa seseorang dikatakan sengaja jika ia mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut serta berkehendak untuk memenuhi perbuatan tersebut.

b. Bentuk/ Corak Kesengajaan

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*Opzet als oogmerk*), atau sering disebut dengan istilah “*dolus directus*”.

Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang “menghendaki” melakukan suatu perbuatan sekaligus “menghendaki” terhadap timbulnya akibat perbuatan itu. Artinya, “kehendak” untuk melakukan “perbuatan” tersebut memang “dimaksudkan” atau “ditujukan” untuk menimbulkan “akibat” yang dikehendaki.⁷¹

- 2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan. Kesengajaan dengan sadar akan kepastian (*Opzet Met Zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*)

Jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk

⁷⁰ *Ibid.* Hal. 214-215.

⁷¹ *Ibid.* Hal.216.

menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari “kepastian” akan terjadinya.⁷²

- 3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet*) atau juga sering disebut dengan istilah “*dolus eventualis*”

Jenis kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari “kemungkinan” terjadinya akibat yang tidak dikehendaki itu kemudian tidak menghalanginya untuk berbuat.⁷³

2. Culpa atau Ketidaksengajaan atau Kealpaan atau Kelalaian

Penggunaan istilah “kealpaan/kelalaian” merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak” dilakukan dengan sengaja.⁷⁴

⁷² *Ibid.* Hal 216-217.

⁷³ *Ibid.* Hal 219-220.

⁷⁴ *Ibid.* Hal 248-249

Secara *doctrinal*, untuk adanya “kealpaan/kelalaian” harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

- a) Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan

Syarat yang pertama diatas mengandung pengertian bahwa untuk adanya “kealpaan/kelalaian” pada seseorang, maka harus dapat dibuktikan, bahwa orang itu telah berbuat tidak hati-hati.⁷⁵

- b) Adanya “akibat” yang dapat diduga sebelumnya

Syarat yang kedua ini mengandung pengertian, bahwa untuk adanya “kealpaan/ kelalaian” pada diri seorang pelaku, haruslah dapat dibuktikan, bahwa si pelaku “dapat” menduga akan timbulnya “akibat” dari perbuatannya.⁷⁶

Penjabaran mengenai unsur kesalahan dalam Tindak Pidana yang merupakan subbab dari Tindak Pidana dalam Penelitian Hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait Unsur Kesalahan dan sebagai pemahaman dalam pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam Tindak Pidana, serta sebagai Tolak ukur Penulis dalam Bab Pembahasan saat mengkualifikasi unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan dalam Perbuatan tersebut.

C.4 Jenis-Jenis/ Penggolongan Tindak Pidana

1. Penggolongan Tindak Pidana Menurut Doktrin
 - a. Tindak Pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
 - 1) Kejahatan

Secara *doctrinal* kejahatan adalah *revhtdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan,

⁷⁵ *Ibid.* Hal. 249.

⁷⁶ *Ibid.* Hal 251-252.

terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.⁷⁷

Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Van Bammelen mengatakan bahwa “Kejahatan adalah tiap Perbuatan yang bersifat asusila, melanggar norma, mengacaukan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu.”⁷⁸

2) Pelanggaran

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁷⁹

b. Tindak Pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

1) Tindak Pidana Formil

Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/

⁷⁷ *Ibid.* Hal. 105-106.

⁷⁸ Abdul Wahid Dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 1.

⁷⁹ Tongat, *Op.Cit.*, Hal. 106.

selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat.⁸⁰

2) Tindak Pidana materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan, bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.⁸¹

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik *comissionis*, *delik omisionis* dan *delik comisionis per omissionis comissa*

1) *Delik Comissionis*

Delik Comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang.⁸²

2) *Delik Omissionis*

Delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.⁸³

3) *Delik Comissionis Per Omissionis Comissa*

Delik Comissionis Per Omissionis Comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁸⁴

d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (Delik Dolus dan Delik Culpa)

1) Tindak pidana kesengajaan./ delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana

⁸⁰ *Ibid.* Hal. 106-107.

⁸¹ *Ibid.* Hal. 107.

⁸² *Ibid.* Hal. 108.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP dan sebagainya.⁸⁵

- 2) Tindak pidana kealpaan/ delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang dan delik yang diatur dalam Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka.⁸⁶

e. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/ delik tunggal dan delik berganda

- 1) Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan.⁸⁷
- 2) Delik berganda adalah delik untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.⁸⁸

f. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus

- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/ perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus.⁸⁹
- 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus.⁹⁰

⁸⁵ *Ibid.* Hal. 109.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.* Hal. 110.

- g. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
- 1) Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan.⁹¹
 - 2) Tindak pidana bukan aduan yaitu tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁹²
- h. Tindak Pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi
- 1) Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan.⁹³
 - 2) Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.⁹⁴
2. Penggolongan Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam
- Tindak Pidana dalam konteks hukum pidana islam didasarkan pada jenis sanksi yang diancamkan, yang terbagi menjadi 2 yaitu :
- a. Tindak Pidana (Jarimah) Hudud

Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana hudud. Adapun pidana hudud adalah pidana yang telah ditentukan secara jelas dan tegas di dalam nash/hukum (baik berupa Al-Quran maupun As-Sunnah) mengenai jenisnya, berat ringannya maupun cara pelaksanaannya.⁹⁵
 - b. Tindak Pidana (Jarimah) Ta'ziir

Tindak pidana ta'ziir adalah tindak pidana yang diancam pidana ta'ziir. Pidana ta'ziir adalah pidana yang tidak ditentukan

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.* Hal. 111.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 113.

secara jelas dan tegas di dalam nash (baik Al-Quran maupun As-Sunnah).⁹⁶

Dijabarkannya tentang Jenis-Jenis dan Penggolongan Tindak Pidana dalam Penelitian Hukum ini digunakan sebagai gambaran umum dan pemahaman mengenai Jenis-Jenis dan Penggolongan Tindak Pidana dan Acuan untuk Penulis supaya tidak ada kekeliruan penerapan Jenis tindak pidananya.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA

D.1 Pengertian Hukum Pidana

Moeljatno memberikan makna hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁹⁷

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan istilah hukum pidana bermakna jamak yang meliputi :⁹⁸

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaranannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang

⁹⁶ *Ibid.* Hal. 114.

⁹⁷ Moeljatno. 1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Bina Aksara, Hal. 1.

⁹⁸ Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 1

berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-peraturan-peraturan itu; dengan kata lain hukum penitensier atau hukum sanksi.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Menurut Simons, hukum pidana adalah :⁹⁹

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Menurut Van Hamel, hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (Penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁰⁰

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁰¹

⁹⁹ Tongat, *Op.Cit.*, Hal. 15

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ C.S.T. Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 242.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah sekumpulan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku yang berisi perintah dan larangan, yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanksi berupa Pidana bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut.

Pemaparan mengenai pengertian Hukum Pidana yang merupakan subbab dari Hukum Pidana di Indonesia dalam Penelitian Hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait pengertian Hukum Pidana yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai pemahaman dalam pembahasan subbab-subbab berikutnya dalam Hukum Pidana di Indonesia.

D.2 Fungsi Hukum Pidana

Menurut Soedarto, fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Umum

Fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹⁰²

Pandangan Sudarto yang menggarisbawahi, bahwa hukum hanya mengatur atau memperhatikan perbuatan-perbuatan yang ada sangkut-pautnya dengan masyarakat (*sozialrelevant*), mengandung makna, bahwa pada hakikatnya hukum itu hanya “dapat” mengatur sehingga juga hanya “dapat” menjangkau sikap tindak/perilaku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain. Hukum tidak “memperhatikan” atau tidak “menjangkau” sikap batin manusia. Dengan demikian, agar dapat terjangkau oleh hukum, maka sikap batin manusia itu harus sudah secara obyektif atau secara materiil

¹⁰² Tongat, *Op.Cit.*, Hal. 20

terwujud dalam sikap tindak/perilaku manusia. Kemampuan hukum termasuk hukum pidana di dalam mengatur pergaulan hidup antar manusia, hanya terbatas pada hubungan atau pergaulan hidup yang secara materiil dapat dibuktikan, artinya ada wujud perbuatan materiilnya. Sikap batin yang belum atau tidak terwujud dalam sikap tindak/perilaku manusia tidak dapat dijangkau oleh hukum.¹⁰³

2. Fungsi Khusus

Secara khusus hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, kehormatan, harta dan kemerdekaan) dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih kejam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.¹⁰⁴

Dikutipnya atau dicantumkannya mengenai Fungsi Hukum Pidana yang merupakan subbab dari Hukum Pidana di Indonesia dalam Penelitian Hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait Fungsi Hukum Pidana yang dimaksud dalam penelitian ini dan sebagai pemahaman dalam Penetapan suatu tindak pidana atau sanksi tindak pidana yang tidak menyimpang dari fungsi hukum pidana tersebut.

D.3 Pembagian Hukum Pidana

1. Hukum Pidana dapat dibagi dalam :

- a. Hukum pidana materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana.

¹⁰³ *Ibid.* Hal. 20-21.

¹⁰⁴ *Ibid.* Hal. 21

- b. Hukum pidana formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.¹⁰⁵
2. Hukum Pidana dapat dibagi dalam :
 - a. Hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang..
 - b. Hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari aturan-aturan hukum pidana khusus ini bias disebabkan karena berkaitan dengan orangnya misalnya hukum pidana militer, yang khusus berlaku untuk anggota militer.¹⁰⁶
3. Hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan wilayah berlakunya :
 - a. Pidana umum (berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan Undang-undang tersebar di luar KUHP);
 - b. Hukum Pidana Lokal (Perda untuk daerah-daerah tertentu)¹⁰⁷
4. Hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan bentuknya :
 - a. Hukum Pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu :
 - 1) Hukum Pidana yang dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); dan
 - 2) Hukum Pidana yang tidak dikodifikasikan (tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri seperti UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana/korupsi, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya).¹⁰⁸
 - b. Hukum Pidana tidak tertulis (Hukum Pidana Adat) adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah Pasal

¹⁰⁵ *Ibid.* Hal. 26

¹⁰⁶ *Ibid.* Hal 26-27.

¹⁰⁷ Andi Sofyan Dan Nur Azisa., 2016. *Hukum Pidana*. Makassar : Pustaka Pena Press. Hal 4-6.

¹⁰⁸ *Ibid.*

131 IS (*indische staatsregeling*) atau AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*). Pada zaman UUDS Pasal 32, 43 Ayat (4), Pasal 104 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 13, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 5 Ayat (1), UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dalam Pasal Ayat (3 sub b).¹⁰⁹

Dapat disimpulkan bahwa Pembagian Hukum Pidana terdiri dari beberapa kelompok yaitu berdasarkan wilayah berlakunya, umum dan khusus, materiil dan formil, serta tertulis dan tidak tertulis.

Dikutipnya atau dicantumkannya mengenai Pembagian Hukum Pidana yang merupakan subbab dari Hukum Pidana di Indonesia dalam Penelitian Hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait Pembagian Hukum Pidana.

D.4 Sumber Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum yakni :

1. KUHP (*Wet Boek van Strafrecht*) sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia terdiri atas :¹¹⁰
 - a. Tiga Buku KUHP, yaitu Buku I Baguan Umum, Buku II tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran.
 - b. *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan terhadap KUHP. Penjelasan ini tidak seperti penjelasan dalam perundang-undangan Indonesia. Penjelasan ini disampaikan bersama rancangan KUHP pada *tweede kamer* (parlemen Belanda) pada tahun 1881 dan diundangkan tahun 1886.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.* Hal. 8

KUHP sendiripun telah mengalami banyak perubahan maupun pengurangan. Dengan demikian undang-undang yang mengubah KUHP juga merupakan sumber hukum pidana Indonesia.

2. Undang-undang diluar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Narkotika, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).¹¹¹
3. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana.¹¹²
4. Di daerah-daerah perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP. Hukum adat (hukum pidana adat) masih tetap berlaku sebagai hukum yang hidup (*The living law*).¹¹³

Dari keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa Sumber Hukum Pidana dapat diperoleh dari KUHP, Undang-Undang diluar KUHP, Hukum Adat dan beberapa Yurisprudensi atau Putusan Pengadilan.

Dikutipnya atau dicantumkanannya mengenai Pembagian Hukum Pidana yang merupakan subbab dari Hukum Pidana di Indonesia dalam Penelitian Hukum ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait Pembagian Hukum Pidana dan sebagai acuan Penulis dalam menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang masuk dalam Penelitian Hukum ini.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.* Hal 8-9.

¹¹³ *Ibid.* Hal 9.